

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan memerlukan upaya penanganan yang serius dengan penanggulangan kemiskinan yang cepat dan tepat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha serta upaya yang bersifat pemberdayaan dan penguatan masyarakat.¹ Untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan ini, Pemerintah Indonesia menetapkan sebuah kebijakan yang dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat² (PNPM) Mandiri.

Salah satu program Pemerintah Indonesia yang didasari pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat

¹Ayip Muflich. Kebijakan Teknis PNPM Mandiri Perdesaan dan Kesiapan Instansi Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri (www.scribd.com) di akses pada tanggal 12 November 2012.

² Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dari tingkat pusat hingga desa-desa sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat di tingkat desa diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat sehingga nantinya dapat memperbaiki perekonomian masyarakat setempat. (Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri <http://www.pnpm-mandiri.org> di akses pada tanggal 12 November 2012)

Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) menyatakan bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja telah dibentuk Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.³

Pengertian PNPM Mandiri yaitu program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.⁴

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program utama dari PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin diperdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.⁵ Wilayah kerja dan target sasaran dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah masyarakat perdesaan.

³ Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) bagian menimbang nomor 1

⁴ Pengertian dan Tujuan PNPM (www.pnpm-mandiri.org) di akses pada tanggal 12 November 2012

⁵ Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan (www.pnpm-perdesaan.or.id) di akses pada tanggal 12 November 2012

Program PNPM MPd memiliki tiga komponen utama, diantaranya adalah Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang alokasinya digunakan untuk pembangunan, Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang alokasinya digunakan untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, dan kegiatan pelatihan masyarakat (*Capacity Building*) dan yang terakhir adalah pendampingan masyarakat.⁶ Pada komponen Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terdapat beberapa kegiatan yang didanai, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.
2. Kegiatan pelayanan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal).
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

PNPM MPd merupakan program pemberdayaan terbesar di Indonesia dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia, salah satu provinsi yang melaksanakan PNPM MPd adalah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di

⁶ Awal Mula Lahirnya PNPM Mandiri Perdesaan (www.pnpm-perdesaan.or.id) di akses pada tanggal 12 November 2012

⁷ Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan (www.pnpm-perdesaan.or.id) di akses tanggal 12 November 2012

Sumatera Barat dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintah, dibantu oleh fasilitator atau pendamping. Sedangkan sumber dan peruntukkan dana berasal dari; APBN, APBD Kabupaten berdasarkan indeks fiskal kemiskinan daerah (IFKD) yang telah ditetapkan, kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), dan swadaya masyarakat.⁸

Aparat pemerintahan sebagai fasilitator dalam pembangunan perlu komitmen yang tinggi untuk melakukan peran sebagai pendamping masyarakat, disamping itu swasta/dunia usaha tidak dapat melepaskan diri untuk berperan dalam keberhasilan pembangunan terutama pembangunan nagari di Sumatera Barat. Untuk menjalankan PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik diperlukan sinergi dan koordinasi antara setiap elemen.

Provinsi Sumatera Barat mulai dari tahun 2009 melaksanakan pertemuan antara pelaku dan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan se Sumatera Barat dalam bentuk kegiatan Jambore dan Pameran PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sumatera Barat. Jambore dan pameran PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan setiap tahunnya di kabupaten-kabupaten secara bergilir.⁹

Salah satu kabupaten terbaik di Sumatera Barat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri adalah Kabupaten Tanah Datar. Prestasi yang diperoleh Kabupaten Tanah

⁸ Jambore dan Pameran PNPM Mandiri Perdesaan Ke-III Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 (<http://www.sumbarprov.go.id>). Di akses pada tanggal 4 Desember 2012

⁹ Ibid.

Datar terkait program PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah *Si Kompak Awards*, BKAN (Badan Kerjasama Antar Nagari) Terbaik, dan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Terbaik.¹⁰

Kabupaten Tanah Datar merupakan Kabupaten dengan wilayah terkecil di Sumatera Barat dengan luas 133.600 Ha.¹¹ Kabupaten Tanah Datar memiliki penduduk sebanyak 338.494 jiwa yang terbagi ke dalam 14 kecamatan yaitu Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Limo Kaum, Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Sapuluah Koto, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Sungai Tarab, dan Kecamatan Tanjung Baru.¹²

Kecamatan Rambatan merupakan salah satu Kecamatan yang menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang di raih diantaranya Juara 1 Nasional UPK terbaik se Indonesia pada tahun 2009 serta Juara 1 UPK terbaik Provinsi Sumatera Barat tahun 2010.¹³

Kecamatan Rambatan terdiri 5 Nagari yaitu Nagari Simawang, Nagari Rambatan, Nagari Padang Magek, Nagari III Koto, dan Nagari Balimbiang. Pelaksanaan PNPM MPd di Kecamatan Rambatan ini tersebar di semua nagari dan

¹⁰ Profil 5 Tahun Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Tanah Datar. 2012

¹¹ www.tanahdatar.go.id. "Luas Wilayah Kabupaten Tanah Datar" diakses pada tanggal 2 Januari 2012

¹² www.tanahdatar.go.id. "Nagari-Nagari di Kabupaten Tanah Datar" di akses tanggal 22 Desember 2011

¹³ Arsip UPK Rangkang Mandiri Kecamatan Rambatan.

sampai ke jorong. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Rambatan di atur oleh BKAN Kecamatan Rambatan. Sedangkan semua kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Rambatan di kelola oleh UPK Rangkiang Mandiri.

Salah satu kegiatan PNPM MPd di Kecamatan Rambatan adalah Pengelolaan Dana Bergulir yang termasuk ke dalam Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.¹⁴ Kegiatan pengelolaan dana bergulir ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam akses permodalan usaha. Tujuan dari kegiatan pengelolaan dana bergulir adalah:¹⁵

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan;
4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan;

¹⁴ Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Dana Bergulir. Tim Koordinasi PNPM. Jakarta. Hal. 1

¹⁵ Ibid.

5. Peningkatan pelayanan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Mekanisme pengelolaan dana bergulir merupakan tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut: pengajuan usaha pinjaman kelompok; evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK; verifikasi oleh tim verifikasi; keputusan pendanaan; dan keputusan pendanaan yang dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh BKAN (Badan Kerjasama Antar Nagari) atau MAN (Musyawarah Antar Nagari) dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAN atau MAN.¹⁶

Salah satu sasaran kegiatan pengelolaan dana bergulir adalah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk kelompok perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.¹⁷

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan diterapkan di Kecamatan Rambatan pada tahun 2007 seiring dengan dilaksanakannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pelaksanaan Program SPP ini mempunyai tujuan-tujuan yang baik bagi masyarakat yaitu untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala

¹⁶ Ibid. hal.4

¹⁷ Petunjuk Teknis Operasional Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan. Tim Koordinator PNPM. Jakarta. Hal. 58

mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.¹⁸ Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Ketua UPK Rangkiang Mandiri Al Fajri:

Pelaksanaan Program SPP di Kecamatan Rambatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan rumah tangga miskin di kecamatan Rambatan, memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di kecamatan Rambatan untuk dapat mengekspresikan diri dengan jalan melakukan usaha yang nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan, serta dapat meringankan beban hidup apabila dimanfaatkan dan digunakan dengan benar.¹⁹

Sasaran Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Bentuk kegiatan SPP yaitu memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan pinjaman.²⁰

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dilaksanakan dengan mendirikan kelompok-kelompok perempuan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan tersebut dapat dikategorisasikan kepada tiga kelompok yang didasarkan pada perkembangan kelompok selama melakukan kegiatan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Wawancara dengan Al Fajri, Ketua UPK Rangkiang Mandiri, Kantor UPK Rangkiang Mandiri. Kecamatan Rambatan, 22 Oktober 2012

²⁰ PTO Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan. Op. Cit. Hal. 58

pengelolaan dana bergulir PNPM MPd. Berikut kategorisasi tingkat perkembangan kelompok:

Tabel 1.1
Indikator Perkembangan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
Ikatan Pemersatu	Ikatan pemersatu adalah domisili atau geografis atau keluarga	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan/e konomi/simpan pinjam kurang dari satu tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam antara satu tahun sampai tiga tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam lebih dari tiga tahun
Kegiatan anggota untuk tujuan bersama	Belum mempunyai kegiatan secara rutin	Mempunyai kegiatan tetapi belum terencana dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang masih berjalan dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang terus berkembang dengan baik
Pengurus	Belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota	Pengurus belum mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin	Pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik
Aturan kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis.	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik.
Iuran anggota	Belum mempunyai aturan anggota secara wajib/tetap	Mempunyai iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib, iuran sukarela dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
Administrasi kelompok	Belum mempunyai	Mempunyai administrasi	Mempunyai administrasi	Mempunyai administrasi

	administrasi secara tertulis	tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis	tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggungjawabkan	tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggungjawabkan
--	------------------------------	--	---	--

Sumber: PTO Pengelolaan Dana Bergulir. Hal. 21

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat indikator perkembangan kelompok. Dari indikator tersebut maka kelompok Simpan Pinjam Perempuan dapat dikategorisasikan kepada tiga kelompok yaitu:²¹

- a. Kelompok Pemula adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap indikator sampai dengan 9 (sembilan).
- b. Kelompok Berkembang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap indikator antara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas).
- c. Kelompok Siap/Matang adalah jika hasil penjumlahan tiap indikator di atas 18 (delapan belas).

Pada Kecamatan Rambatan terdapat 110 kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Berdasarkan kategori di atas dapat dijabarkan jumlah kelompok yang berada pada masing-masing kategori yang dijelaskan pada tabel berikut:

²¹ PTO Pengelolaan Dana Bergulir. Hal. 20

Tabel 1.2
Jumlah Kelompok SPP Pada Masing-Masing Kategori di Kecamatan Rambatan

Kategori Kelompok SPP	Jumlah
Kategori Pemula	29
Kategori Berkembang	43
Kategori Siap	38

Sumber: UPK Rangkiang Mandiri, 2013.

Berdasarkan tabel di atas dan pemetaan kategori kelompok ini, peneliti memutuskan untuk mengambil satu kelompok simpan pinjam perempuan di Nagari Rambatan dari masing-masing kategori untuk mengetahui bagaimana berjalannya pengelolaan dana bergulir dalam tiga kategori kelompok tersebut berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri (Tim Koordinasi PNPM Mandiri). Jumlah kelompok berdasarkan tiga kategori tersebut yang terdapat di Nagari Rambatan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Kelompok SPP Pada Masing-Masing Kategori di Nagari Rambatan

Kategori Kelompok SPP	Jumlah
Kategori Pemula	29
Kategori Berkembang	43
Kategori Siap	38

Sumber: UPK Rangkiang Mandiri, 2013.

Pemilihan Nagari Rambatan didasarkan karena sebelum masuknya program Simpan Pinjam Perempuan di Nagari Rambatan ini, masyarakat setempat banyak terjerat hutang dengan rentenir yang dikenal dengan sebutan *Si Batak*. Keberadaan

rentenir di daerah ini terbilang cukup banyak berdasarkan pernyataan masyarakat yang ditemui dilapangan. *Si Batak* ini meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga 13 % dan jangka pengembalian waktu pendek yaitu selama 10 minggu.

Hal ini sangat memberatkan masyarakat yang harus setiap minggu membayarkan pendapatan mereka kepada rentenir sehingga masyarakat tidak dapat menikmati pendapatan mereka untuk kehidupan keluarga melainkan uang tersebut habis untuk dibayarkan kepada *Si Batak*. Berdasarkan hasil wawancara pada observasi awal dengan salah satu masyarakat, mengatakan bahwa:

“Dulu sabalun ado program SPP ko ibuk acok maminjam ka si batak nak. Biasonyo si batak ko ado satiok hari senin kamis jo jumat. Banyak yang maminjam biasonyo mah. Tapi mambayianyo satiok minggu nak salamo sapuluah minggu, payah ibuk dek nyo. Kalau indak di bayia, bungonyo batambah taruih. Samakin banyak hutang jadinya. Kalau ndak di pinjam pitih ka inyo indak tau lo kama ibuk ka maminjam lai, anak ko ka masuk sakolah bagai dulu. Dulu ibuk pernah maminjam sajuta ka si batak tu, bara minggu ibuk ndak mambayia batambah bungonyo satiok minggu manjadi duo juta utang ibuk, tambah sasak angok jadinya nak mamikian pitih pambayianyo.”

(Sebelum adanya Program SPP ini ibu sering meminjam kepada *rentenir*. Biasanya *rentenir* tersebut datang setiap hari senin, kamis, dan jumat. Masyarakat sekitar juga banyak meminjam kepada *rentenir* tersebut, tetapi membayar setiap minggu memberatkan ibu. Kalau ibu tidak membayar bunganya semakin bertambah tapi kalau tidak di pinjam ibu memerlukan uang untuk biaya anak masuk sekolah. Dulu ibu pernah meminjam Rp.1.000.000,- kepada *Si Batak*, beberapa minggu tidak membayar bunganya bertambah terus menerus sehingga hutang ibu menjadi Rp.2.000.000,-. Pusing ibu memikirkan mau di bayar pakai apa nak.)²²

²² Wawancara dengan Ibu Erna, Masyarakat Nagari Rambatan, Jorong Rambatan, 13 Juni 2013

Wawancara di atas mengungkapkan bahwa fenomena adanya rentenir di daerah ini cukup memberatkan perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat tidak dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pendapatan yang di terima dari hasil membuat batu bata telah habis untuk membayarkan hutang kepada rentenir-rentenir tersebut setiap minggunya. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit keluar dari lubang kemiskinan.

Pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan dengan kegiatan pengelolaan dana bergulir ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk keluar dari jeratan rentenir yang selama ini telah meresahkan. Program Simpan Pinjam Perempuan dianggap masyarakat sebagai salah satu program yang dapat membantu meningkatkan perekonomian. Sebagian besar masyarakat memilih mengikuti program Simpan Pinjam Perempuan dengan alasan bunga yang diberikan kecil dan waktu pengembalian lama.

Berdasarkan fenomena di atas, kelompok SPP berdasarkan tiga kategori yang menjadi pilihan peneliti yaitu Pertama, Kategori Pemula. Kelompok ini merupakan satu-satunya kelompok yang baru di daerah Rambatan dan masih banyak memiliki kekurangan yang harus dilengkapi. Kelompok ini berdiri pada Januari 2013 dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang. Kelompok ini dikatakan pemula karena indikator-indikator perkembangan kelompok yang menunjukkan banyaknya kekurangan dari kelompok tersebut, ikatan pemersatu di kelompok ini berdasarkan domisili dimana semua anggota berdagang di tempat yang sama. Indikator lainnya yaitu kegiatan

anggota untuk tujuan bersama dimana kelompok ini belum memiliki kegiatan yang dilaksanakan secara rutin yang khusus dilaksanakan untuk membahas perkembangan kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh ketua kelompok yang menyatakan:

“Sajak partamo mulai tabantuak kalompok ko, sakali baru kami batamu basamo-samo, salabiah tu alun pernah lai. Kegiatan kalompok yang rutin memang alun dibantuak lai diak. Buku-buku administrasi kalompok kami masih ado yang kurang”

(Sejak kelompok ini di bentuk pertama kali, pengurus dan anggota hanya melaksanakan pertemuan satu kali, setelah pertemuan yang pertama tersebut belum ada pertemuan lanjutan dilaksanakan. Karena belum dibentuknya kegiatan atau pertemuan rutin kelompok. Administrasi kelompokpun masih terdapat kekurangan)²³

Wawancara di atas mengungkapkan bahwa kelompok ini masih belum memiliki kegiatan rutin dalam kelompok serta masih belum memiliki aturan kelompok yang tetap dan tertulis serta kelengkapan administrasi kelompok yang masih belum lengkap sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan indikator kepatuhan dalam teori Ripley dapat dilihat bagaimana pemahaman kelompok terhadap kegiatan pengelolaan dana bergulir tersebut yang di lihat dari kurangnya kelengkapan administrasi dan kegiatan kelompok yang dilakukan, serta kenapa hal ini terjadi (*what's happening?*).

Kedua, Kategori Berkembang. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok pecahan dari kelompok lain di Nagari Rambatan. Kelompok ini berdiri pada tahun 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang yang sebagian besar berusaha di bidang pembuatan batu bata dan beberapa lainnya merupakan pegawai. Kelompok ini dinyatakan berkembang karena sesuai dengan indikator perkembangan kelompok

²³ Wawancara dengan Ibu Desri Yeni, Ketua Kelompok Setia, Pasar Rambatan, 21 Agustus 2013

yang mengatakan bahwa ikatan pemersatu kelompok ini sudah berdiri selama 2 tahun, kegiatan rutin yang dilakukan dalam kelompok ini masih belum terencana dengan baik, administrasi kelompok yang masih kurang lengkap sesuai dengan yang dianjurkan oleh UPK. Hal ini diperkuat dengan wawancara awal dengan sekretaris kelompok yang menyatakan:

“Kalompok Puding Indah ko tapacah dari kalompok Usaha Baru diak, ado masalah yang manjadi alasan tapacahnyo kalompok usaha baru tu. Dek karena itu kalompok puding indah ko mambuek kalompok surang sahingga banyak yang alun lengkap lai diak, kok rapek kalompok lai dijadwalkan satiok bulan, tapi jarang yang talaksana diak”

(Kelompok Puding Indah memisahkan diri dari kelompok Usaha Baru karena ada masalah yang menyebabkan perpecahan ini terjadi. oleh sebab itu, kelompok Puding Indah belum mempunyai administrasi yang lengkap dan masi jarangya diadakan pertemuan kelompok yang telah dijadwalkan.)

Wawancara di atas menyatakan bahwa kelompok ini memiliki suatu permasalahan sehingga terjadi perpecahan dalam kelompok yang lama serta tidak lengkapnya administrasi kelompok dan tidak dijalankan dengan baik rapat rutin yang telah dijadwalkan. Berdasarkan indikator kepatuhan Ripley dapat dilihat bahwa perilaku implementor kelompok masih perlu dibenahi agar dapat memahami kegiatan pengelolaan dana bergulir seperti yang seharusnya di anjurkan oleh UPK. Pecahnya kelompok induk Puding Indah (Usaha Baru) menimbulkan pertanyaan (*what's happening?*), permasalahan apa yang menyebabkan perpecahan tersebut serta perekrutan anggota yang memperbolehkan pegawai mengikuti kegiatan simpan pinjam ini yang ditujukan kepada masyarakat miskin.

Ketiga, Kategori Siap. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok siap dengan prestasi yang baik. Kelompok ini berdiri pada tahun 2008 dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang. Kelompok ini dinyatakan sebagai kelompok siap karena kelompok tersebut sudah memiliki aturan yang telah disepakati bersama serta mempunyai administrasi yang lengkap. Kelompok ini juga memiliki AD/ART yang mengatur berbagai kegiatan simpan pinjam dalam kelompok tersebut yang telah disepakati bersama oleh anggota dan pengurus kelompok. Kelompok ini juga rutin mengadakan rapat yang membahas bagaimana kegiatan simpan pinjam dalam kelompok. Kelompok ini juga memiliki iuran tetap, iuran wajib serta kas yang digunakan untuk kepentingan anggota kelompok. Dapat dikatakan kelompok siap ini baik dalam hal kategori perkembangan kelompok serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan baik. Ripley mengatakan kepatuhan dalam melaksanakan sebuah kebijakan merupakan suatu hal yang dapat mensukseskan kebijakan tersebut. Berdasarkan indikator dalam teori Ripley kepatuhan kelompok ini dapat dilihat dari pemahamannya terhadap kegiatan pengelolaan dana bergulir serta apa yang terjadi (*what's happening?*) sehingga kelompok tersebut dapat menjalankan kelompok dengan baik.

Berdasarkan penjelasan dari tiga kategori kelompok di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam setiap kategori kelompok yang didasarkan pada indikator perkembangan kelompok sehingga menyebabkan perbedaan cara tiap

kelompok dalam mengelola dana bergulir yang diberikan oleh UPK kepada kelompok dalam tiap kelompok mempunyai fenomena yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan Dana Bergulir merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri sebagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki RTM dalam hal memperbaiki perekonomian. Pengelolaan dana bergulir dalam kelompok SPP di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan dilaksanakan dengan mengacu kepada PTO (Petunjuk Teknis Operasional) yang telah ditetapkan oleh Departemen dalam Negeri. Berdasarkan dari perbedaan yang ditemukan dalam tiap kelompok, terdapat perbedaan kelompok dalam hal mengelola dana bergulir yang diberikan oleh UPK. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi fokus peneliti adalah Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Bergulir Pada Tiga Kategori Kelompok SPP di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pengelolaan dana bergulir pada tiga kategori kelompok SPP di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk melaksanakan serta mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan khazanah ilmu administrasi negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi *stakeholder* yang terkait dalam kegiatan pengelolaan dana bergulir dalam meninjau kembali kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.